



Capaian PAD Galian C di Titik Terendah

SEJAK dulu, sektor tambang seperti galian C menjadi andalan Pemkab Karangasem untuk mendulang PAD. Akan tetapi, sejak Gunung Agung berstatus level IV atau Awas hingga turun lagi ke level III, pengelolaan potensi galian C menjadi kacau.

Kebijakan membuat depo atau tempat penampungan juga tak berarti. Sebab, PAD di awal tahun ini dari sektor galian C juga anjlok. Jika situasi ini terus berlanjut, PAD dari sektor galian C diperkirakan akan bera-

da di titik terendah, berkurang Rp 25 miliar, dari target tahun ini yang sebenarnya sudah diturunkan lagi menjadi Rp 55 miliar.

Situasi ini menjadi sorotan legislator di DPRD Karangasem. Situasi ini terungkap setelah adanya persoalan pada kebijakan pemerintah daerah terhadap pendirian depo, hingga membuat pengusaha galian depa, maupun pengusaha armada truk dan sopir, akhirnya protes. Sebagai contoh di Kecamatan Kubu. Penyebabnya, timbul kesan

monopoli. Pengusaha yang tak tergabung di dalam pengelolaan depo, terkesan tak boleh mengambil atau membeli pasir di luar depo. "Kami tidak pernah mempersoalkan depo. Tetapi, yang menjadi masalah adalah melarang kami ambil pasir ke lokasi galian," kata Nyoman Celos, pimpinan rombongan pengusaha kontra depo asal Kubu, belum lama ini.

Hal. 19
Dampak Serious

Dampak Serious

Dari Hal. 1

Dampak lebih serius dari persoalan ini adalah menurunnya PAD Pemkab Karangasem. "Ini kalau kita lihat ada kerugian bagi pemerintah daerah, karena pendapatan dari sektor pajak mineral bukan logam pasti menurun. Tetapi, kenapa keberadaan depo ini tak dievaluasi. Kenapa pemerintah daerah diam," sorot Celos.

Legislator dari Komisi I DPRD Karangasem, Wayan Sumatra, menilai adanya potensi penurunan PAD karena menurunnya jumlah truk ke lokasi galian, harus disikapi serius. Pemerintah daerah harus hadir disitu untuk mencegah ini terus terjadi. Politisi PDI-P

ini menegaskan, jika situasi ini terus terjadi, maka PAD dari sektor galian C hingga akhir triwulan IV nanti akan berkurang cukup besar mencapai Rp 25 miliar. "Target PAD dari galian C padahal sudah kita turunkan, dari dulu Rp 84 miliar menjadi Rp 55 miliar tahun ini. Kalau situasinya terus seperti ini, maka sampai Desember capaian akan berkurang Rp 25 miliar. Padahal, target sudah diturunkan Rp 30 miliar," tegasnya.

Dengan target Rp 55 miliar, maka minimal per bulannya BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) seharusnya bisa memperoleh PAD sektor galian C, Rp 4 miliar. Tetapi, untuk bulan Januari

saja, sektor galian C hanya menyumbang Rp 1,9 miliar. Kondisi demikian diakui Kepala BPKAD Karangasem Nengah Mindra. Tetapi, dia enggan menanggapi apakah situasi ini memang karena adanya status Awas Gunung Agung hingga berdirinya depo, atau ada sebab lain. Meski demikian, pihaknya menegaskan pemerintah daerah tak ada sangkut pautnya dengan tuduhan upaya monopoli. Sebab, depo didirikan atas kesepakatan pengusaha lokal setempat, agar sejalan dengan upaya kontinjensi pemerintah. Setelah adanya depo dan situasi terkini, radius berbahaya turun jadi 4 km, maka di sana berlaku mekanisme pasar. "Kami akan evaluasi," kata Mindra. (gik)

Edisi : Minggu, 4 Maret 2018

Hal : 1 dan 19